

**PERJANJIAN KINERJA  
KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2015**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
1. Meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Manusia.	1) Indeks Pembangunan Manusia	76%
2. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan kebutuhan dasar masyarakat bidang pendidikan.	2) Tingkat daya tampung pendidikan PAUD	44
	3) Angka Partisipasi Murni SD/MI	108%
	4) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	86%
	5) Angka Partisipasi Murni SMA/MA	140,76%
	6) Rata-rata lama sekolah	9,31%
	7) Angka melek huruf usia 15-24 tahun	97,7%
3. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	8) Cakupan kunjungan ibu hamil K4	95.36%
	9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	68.91%
	10) Pertolongan persalinan oleh bidan atau nakes yang mempunyai kompetensi kebidanan	95.27 %
	11) Cakupan pelayanan nifas	93.51%
	12) Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	68.18%
	13) Cakupan kunjungan bayi	96.82%
	14) Cakupan kelurahan/desa Uci	90.55%
	15) Cakupan pelayanan anak balita	87.27%
	16) Cakupan penderita gizi buruk mendapatkan perawatan	81.82%
	17) Cakupan peserta KB aktif	73.82%
	18) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit AFP, pneumonia balita, TB paru, DBD dan Diare	100%
	19) Cakupan yankesdas masyarakat miskin	98.18%

	20)	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	98,55%
	21)	Cakupan kelurahan/ desa mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi	100%
4. Meningkatnya Kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	22)	Jumlah masyarakat miskin yang di rujuk ke Rumah Sakit Daerah	1400 Pasien
	23)	Rata-Rata kunjungan Rawat jalan Per hari	75 Pasien
5. Meningkatnya standar Mutu Pelayanan Rujukan, rawat jalan dan dan rawat inap	24)	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa	12 Unit
	25)	Meningkatnya jumlah sarana dan prasarana kesehatan	31 Unit
6. Meningkatnya sinergitas dan terakomodirnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan daerah	26)	Tingkat Keselarasan RKPD dengan RPJMD	85 %
	27)	Tingkat keselarasan Renstra SKPD dengan RPJMD	85 %
	28)	Tingkat Keselarasan Renja SKPD dengan RKPDP	85 %
	29)	Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan	12 Jenis
7. Meningkatkan pengelolaan kekayaan daerah yang transparan dan akuntabel	30)	Tingkat derajat desentralisasi (PAD/Penerimaan Daerah)	97%
	31)	Tingkat efisiensi Pemungutan PAD (Penerimaan PAD/Potensi PAD)	97%
	32)	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah	WTP (Kategori)
8. Meningkatnya fasilitas penanganan konflik pertanahan daerah	33)	Jumlah Fasilitas konflik pertanahan yang ditindaklanjuti	4HGU
9. Meningkatnya pengembangan pembangunan desa	34)	Jumlah Tapal Batas Desa yang diselesaikan	35 Desa
	35)	Jumlah Desa yang memiliki Peta Administrasi	16 Desa
10. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	36)	Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah	12 SKPD
	37)	Persentase pencapaian sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi	60 %
	38)	Peringkat Prestasi kinerja Berdasarkan evaluasi LPPD	3 (Peringkat)

	39)	Jumlah Laporan rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti	150 (Rekomendasi)
	40)	Cakupan Legislasi Produk Hukum (Raqan, Perbup)	12 Qanun 29 Perbup
	41)	Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	30 Kasus
11. Meningkatnya Legislasi Peraturan Perundang-undangan	42)	Tingkat Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	12 Proleg
12. Meningkatnya pembinaan dan pengembangan aparatur	43)	Pembangunan/pengembangan sistem informasi Kepegawaian	1 Unit
13. Meningkatnya pelayanan Dokumen Kependudukan	44)	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	37000 KK
	45)	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	91216KK
	46)	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kelahiran	4881 AK
	47)	Cakupan Penerbitan Kutipan Akte Kematian	4KARTU
14. Meningkatnya pembinaan desa/kampung	48)	Jumlah Kampung yang dibina	10 Desa
	49)	Jumlah Kampung yang dinilai	11 Desa
15. Meningkatnya budaya olahraga dalam masyarakat	50)	Jumlah Prestasi dalam bidang olahraga	8 Tropy
16. Terciptanya masyarakat yang berwawasan kebangsaan, berbasis pengetahuan dan akhlakul karimah.	51)	Jumlah Pembinaan partaipolitik	15 Parpol
	52)	Jumlah Organisasi dan LSM yang terinventarisir	44 LSM
17. Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal:	53)	Jumlah Izin yang diterbitkan	1350 Izin
18. Meningkatnya Produktivitas pertanian dan Pembinaan Lembaga petani	54)	Tingkat produksi komoditi : a. Padi b. Jagung c. Palawijaya	5600 Ton 225 Ton 1050 Ton
	55)	Luas Lahan Tanam	2700 Ha
	56)	Jumlah Penyuluhan petani	2 Kali
	57)	Jumlah pelatihan petani	2 Kali

19. Meningkatkan produktivitas Sektor Peternakan dan kesehatan hewa dalam rangka pencapaian swasembada daging	58) Peningkatan ketersediaan ternak per tahun	2.7 %
	59) Angka Kesakitan Hewan	26 %
20. Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	60) Meningkatnya reboisasi hutan dan penghijauan lahan	5 Ha
	61) Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi	225 Ha
	62) Luas kerusakan kawasan hutan	78500 Ha
21. Meningkatnya produksi Perkebunan	63) Tingkat produksi komoditi : a. Sawit    b. Karet	155 Ton
	64) 1) Luas Lahan Tanam	46.5 Ha
22. Meningkatnya produksi Perikanan	65) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Laut	10.818 Ton
	66) Jumlah Hasil Produksi Perikanan Air Tawar	28,85 Ton
	67) Jumlah sarana dan Prasarana perikanan	25 Unit
23. Meningkatnya pembinaan Koperasi	68) Jumlah Koperasi yang aktif	92 Unit
	69) Jumlah Koperasi yang sehat	25 Unit
24. Meningkatnya pembinaan UKM	70) Persentase UKMK yang mengembalikan dan bergulir	12 %
25. Terakomodirnya masyarakat pengguna jasa transportasi darat dan laut	71) Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten /kota	15 %
	72) Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan daerah terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan	10 %

	73)	Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15 %
	74)	Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	15 %
	75)	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardil) dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota	20 %
	76)	Tersedianya unit penguji kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji,	37,50 %
	77)	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota untuk menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebrangan	15 %
26. Optimalisasi Mutu Pelayanan Bidang Perhubungan Darat, Sungai dan Laut di Kabupaten	78)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Terminal pad Kabupaten Kota yang telah memiliki terminal	20 %
	79)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengujian Kendaraan bermotor pada Kabupaten/Kota yang telah melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor	15 %
	80)	Tersedianya kapal penyeberangan yang beroperasi pada lintas dalam kabupaten/kota pada wilayah yang telah ditetapkan lintas penyebarangan dalam kabupaten/kota	10 %

27. Penguatan Ekonomi Base Daerah bersinergi dengan peningkatan sarana dan prasarana penunjang pemberdayaan ekonomi masyarakat	81)	Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.	40 Ha
	82)	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.	5 Km
	83)	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.	7 Km
	84)	Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat	10 Km
	85)	Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.	10 Km
	86)	Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana	35 Km/Jam
	87)	Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/ hari	1500 Jiwa
	88)	Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.	10 Unit
	89)	Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota	10 Unit
	90)	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun	4246 M
91)	Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.	5 Ha	
28. Meningkatnya Rumah Layak Huni dan Terjangkau	92)	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	142 Unit
	93)	Cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau	500 KK

29. Lingkungan yang Sehat dan Aman yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	94) Cakupan lingkungan yg sehat dan aman yg didukung Prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	20 Desa
30. Meningkatnya upaya pelestarian cagar budaya	95) Jumlah pelestarian situs resmi daerah	1 Unit
31. Pengurangan resiko bencana	96) Persentase pencegahan dini dan Penanggulangan bencana	80 %
32. Meningkatnya sumber daya sektor industri dan pariwisata.	97) Jumlah objek wisata	7 Lokasi
	98) Jumlah wisatawan ke objek wisata : a. Wisatawan dalam Negeri b. Wisatawan luar Negeri	a. 15.000 b. 3.000
33. Meningkatnya Perlindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Bidang Kesenian	99) Cakupan Kajian Seni (50%)	10 %
	100) Cakupan Fasilitasi Seni (30%)	10 %
	101) Cakupan Gelar Seni (75%)	15 %
	102) Misi Kesenian	100 %
	103) Cakupan Sumberdaya Manusia Kesenian (25%)	5 %
	104) Cakupan Tempat (100%)	100 %
	105) Cakupan Organisasi Bidang Kesenian	100 %
34. Meningkatkan penataan dan pemeliharaan prasarana dan sarana taman kota dalam rangka mengurangi pemanasan global.	106) Jumlah pembangunan taman kota	20 %
	107) Persentase peningkatan penanaman tanaman pada taman jalan utama	25 %
	108) Penetapan luas kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa	20 %
35. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap ketaatan pengelolaan limbah cair, emisi/polusi udara serta limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	109) Jumlah peralatan laboratorium lingkungan	20 %
	110) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	14.29 %
	111) Jumlah industri yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	20 %
	112) Peningkatan pengelolaan limbah padat dan limbah B3 oleh industri.	25 %

36. Meningkatkan pemantauan dan pengawasan Danau, Sungai dan Laut terhadap pencemaran oleh limbah domestik.	113) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Danau	12.5 %
	114) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Sungai	20 %
	115) Jumlah penambahan titik pemantauan Air Laut	20 %
37. Meningkatkan kualitas lingkungan terhadap Perubahan iklim dan bencana alam	116) Jumlah alat pemantau curah hujan, suhu dan kelembaban udara	42.86%
	117) Cakupan wilayah yang terpantau curah hujan, suhu dan kelembabannya	14.28%
	118) Cakupan pengembangan data dan informasi lingkungan	50 %
38. Meningkatnya PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar	119) Persentase (%) Fakir Miskin dan PMKS Lainnya Yang Memperoleh Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	3 %
	120) Cakupan Pembinaan Para Penyandang cacat dan Trauma	500 Orang
	121) Persentase (%) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) Yang Memperoleh	50 % 80 Orang
	122) Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar	
	123) Persentase (%) Eks Penyandang Penyakit Sosial Yang Memperoleh Pembinaan Sosial Melalui Pendidikan dan Pelatihan	37 % 70 Orang
39. Terlaksananya Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Bagi Fakir Miskin atau Keluarga Rentan	124) Persentase (%) Keluarga Miskin Yang Menerima Program Pemberdayaan Sosial Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau Kelompok Sosial Ekonomi Sejenis Lainnya	50 % 500 Orang
40. Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	125) Persentase (%) Panti Sosial Yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial	100 %
41. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Mengevakuasi Korban Bencana Alam	126) Persentase (%) Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Sosial Selama Masa Tanggap Darurat	80 %
42. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Cacat dan Lanjut Usia Tidak Potensial	127) Persentase (%) Penyandang Cacat Fisik Dan Mental Yang Telah Menerima Jaminan Sosia	25 % 200 Orang
	128) Persentase (%) Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial	18 % 185 Orang



43. Meningkatnya Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi, Berbasis Masyarakat dan Kewirausahaan	129) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	80 %
	130) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Masyarakat	65 %
	131) Besaran Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan	65 %
44. Meningkatnya Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan,	132) Besaran Pencari Kerja Yang Terdaftar Yang Ditempatkan	70 %
45. Meningkatnya Besaran Kasus Yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) serta Besaran Pekerja/ Buruh yang Menjadi Peserta Jamsostek	133) Besaran Kasus Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama (PB)	50 %
	134) Besaran Pekerja/Buruh Yang Menjadi Peserta Program Jamsostek	50 %
46. Meningkatnya Pemeriksaan Perusahaan dan Pengujian Peralatan di Perusahaan	135) Besaran Pemeriksaan Perusahaan	45 %
	136) Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	50%
47. Meningkatnya Perekonomian dan Keterampilan Warga Transmigrasi dan Penduduk Sekitar	137) Tingkat Perekonomian Warga Transmigrasi	3 UPT
	138) Tingkat Keterampilan Warga Transmigrasi	3 UPT
48. Meningkatnya Jumlah Kelompok Masyarakat yang ber KB dan ber kategori keluarga sejahtera	139) Indeks Keluarga Sejahtera	20 %
	140) Prevalensi peserta KB aktif	10 %
	141) Jumlah Alat Kontrasepsi KB	50000 Set
49. Terwujudnya pelayanan KIE KB - KS bagi Masyarakat dan bagi PUS yang isterinya dibawah usia 20 tahun	142) Persentase peningkatan KIE KB / KS	12%
	143) Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun	200 Orang
50. Terwujudnya Pelayanan KIE KB - KS bagi PUS untuk menjadi peserta KB Aktif	144) Cakupan Sasaran PUS menjadi Peserta KB – Aktif	9.900 Orang
	145) Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi ( unmet need )	2500 Orang
	146) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita ( BKB ) ber - KB	1050 Orang
	147) Cakupan PUS peserta KB Anggota UPPKS yang ber - KB	160 Orang
51. Meningkatkan pembinaan KB - KS bagi peserta KB Aktif Pria dan Wanita melalui PPKB yang tersebar di setiap desa / kelurahan	148) Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana / penyuluh keluarga berencana ( PLKB / PKB ) 1 petugas di setiap 2 desa / kelurahan	13 Orang

	149) Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana ( PPKBD ) 1 petugas d setiap desa / kelurahan	120 Orang
	150) Jumlah kelompok pembinaan	11 Kelompok
	151) Jumlah Petugas KB	60 Orang
52. Meningkatnya kesehatan reproduksi remaja	152) Jumlah ( unit ) MUPEN dan MUYAN	2 Unit
	153) Peningkatan Jumlah KRR	21 Kelompok
53. Meningkatnya fasilitas Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	154) Fasilitas pembinaan KB - KR yang Mandiri bagi masyarakat	11 Kelompok
	155) Persentase peningkatan kesehatan Ibu, Bayi, dan Anak setelah penyuluhan	25 Kelompok
	156) Jumlah tenaga pendamping disetiap kelompok Bina Keluarga di kecamatan	13 Plkb
	157) Persentase Peningkatan Pengembangan Model Operasional BKB - Posyandu – PADU	22 Kelompok
54. Meningkatnya penerapan Syariat Islam yang kaffah dalam kehidupan masyarakat.	158) Jumlah Pelaksanaan Syiar dakwah dan peribadatan kepada masyarakat	20 Kali
	159) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Lembaga Pendidikan dan Ormas Islam	15 Unit
	160) Berfungsinya Sarana dan Prasarana Peribadatan	9 Unit
	161) Jumlah Kasus Pelanggaran Syariat Islam yang ditindaklanjuti/diselesaikan (Kali)	14 Kali

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                | Rp. 3,977,491,277,- |
| 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun          | Rp.27,856,993,869,- |
| 3. Program Pendidikan Menengah                             | Rp. 9,454,966,235,- |
| 4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan | Rp. 3,430,633,258,- |
| 5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan                  | Rp. 174,390,000,-   |
| 6. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan                   | Rp.2,746,507,700,-  |
| 7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat                      | Rp. 2,428,265,374,- |
| 8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat   | Rp.26,533,188,-     |

9. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Rp. 1,543,161,904,-
10. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Rp.22,961,299,-
11. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Rp. 914,063,722,-
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Rp.694,439,482,-
13. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin	Rp. 110,670,000
14. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan jaringannya	Rp. 4,769,590,002,-
15. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Rp. 345,000,000,-
16. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Rp. 800,595,900,-
17. Program Kemitraan Pegobatan Lanjutan bagi Pasien Rujukan	Rp.12,083,000,000,-
18. Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah SakitParu-paru/ Rumah SakitMata	Rp.5,298,577,243,-
19. Program Kerjasama Pembangunan	Rp.76,743,500,-
20. Program Perencanaan Wilayah Cepat Tumbuh	Rp.30,950,000
21. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.298,062,500,-
22. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Rp.183,197,000,-
23. Program Perencanaan Tata Ruang	Rp.43,950,000,-
24. Program Pemanfaatan Tata Ruang	Rp. 60,350,000,-
25. Program Pengembangan Data / Informasi	Rp.219,894,500,-
26. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Rp.140,000,000,-
27. Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp.140,000,000,-
28. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan	Rp.2,219,375,000,-
29. Keuangan Daerah	Rp.2,219,375,000,-
30. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan	Rp.86,000,000,-
31. Kabupaten/Kota	Rp. 137,615,000,-
32. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 151,770,000
33. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	Rp. 76,807,000,-
34. Program Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SPKD	Rp. 164,796,000,-
35. Program Legislasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 496,438,500,-
36. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan	Rp. 464,175,000,-
37. Media Massa	Rp. 20.000.000,-
38. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga	Rp. 301,041,207
39. Perwakilan Rakyat Daerah	Rp. 849,400,000,-
40. Program Peningkatan Perbaikan Dokumen/Arsip Daerah	Rp.265,058,581,-
41. Program Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi	Rp. 40,000,000,-
42. Kepegawaian	
43. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan	
44. Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala daerah	
45. Program penataan Administrasi Kependudukan	
46. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	

47. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam	
48. Membangun Desa	Rp. 255,198,600,-
49. Program Pengelolaan Keragaman budaya	Rp. 620,000,000,-
50. Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah Raga	Rp. 200,000,000,-
51. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Olah Raga	Rp. 775,000,000,-
52. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp. 210,000,000,-
53. Program Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 461,523,600,-
54. Program Pendidikan Politik Masyarakat	Rp. 16,550,000
55. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 543.668.079,-
56. Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 1,054,199,982,-
57. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian	Rp. 267,488,434,-
58. Program Peningkatan Produksi Pertanian	Rp. 1,684,524,884,-
59. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 50,000,000,-
60. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	
61. Pertanian/Perkebunan	Rp. 2,526,609,738,-
62. Program Perlindungan & Konservasi Sumber Daya Hutan	Rp. 61,200,000,-
63. Program rehabilitasi Hutan & Lahan	Rp. 1,798,790,000,-
64. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Rp. 882,200,000,-
65. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Rp. 3,717,676,070,-
66. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Rp. 333,331,200,-
67. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 224,990,000,-
68. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Rp. 710,285,127,-
69. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Rp. 147,600,000,-
70. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp. 6,611,221,000,-
71. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp. 1,217,667,000,-
72. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Rp. 51,300,000,-
73. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Rp. 74,824,000,-
74. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Rp. 8,528,545,000
75. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Rp. 9,917,598,578,-
76. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 980,000,000,-
77. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Rp. 1,107,551,000,-
78. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Rp. 2,884,807,000,-
79. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Rp. 68,358,557,994,-
80. Program Lingkungan Sehat Perumahan	Rp. 1,322,075,000,-
81. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	Rp. 3,374,157,810,-
82. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Rp. 16,807,946,233,-
83. Program Pengembangan & Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa & Jaringan Pengairan Lainnya	Rp. 10,720,770,137,-
84. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rp. 4,290,835,310,-

85. Program Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh	Rp. 6,159,234,850,-
86. Program Infrastruktur Perdesaan	Rp. 350,000,000,-
87. Program Pengembangan Perumahan	Rp.12,538,619,642,-
88. Program Perencanaan Tata Ruang	Rp. 130,000,000,-
89. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Rp. 1,405,432,000,-
90. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	Rp.698,419,500,-
91. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Rp. 153,100,000,-
92. Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Rp. 375,000,000,-
93. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp. 902,648,000,-
94. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan	
95. Gender dan Anak	Rp. 28.980.000,-
96. Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rp. 85,000,000,-
97. Program Keluarga Berencana	Rp. 41,500,000,-
98. Program Pelayanan Kontrasepsi	Rp. 101,750,000,-
99. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunikasi Adat	
100. Terpencil (KAT) & Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Rp. 93,010,000,-
101. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rp. 219,658,247,-
102. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 230,435,000,-
103. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial	Rp. 23,948,750,-
104. Program Perberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 55,589,000,-
105. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 55,589,000,-
106. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan	Rp. 126,393,500,-
107. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 20,036,225,-
108. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Rp. 25,000,000,-
109. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Rp. 451,093,000,-
110. Program Dakwah dan Peribadatan	Rp.4,125,947,025,-
111. Program Bina Hukum Syari'at Islam	Rp.941,390,000,-

Singkil, Februari 2015

